



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026, sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2026.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Renja Perangkat Daerah meliputi:

- a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- b. bab II berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024.
- c. bab III berisi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menjelaskan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, tujuan, dan sasaran serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- d. bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.
- e. bab V berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tuban di bidang pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, serta rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dibidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam rangka menjamin kesesuaian program dan kegiatan antar dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, serta optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026, untuk itu Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Th 2019 NO 42, TLN RI Th 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (BN RI Th 2019 NO 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Seri D Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (LD Kab Tuban Th 2016 seri D NO 1, TLD Kab Tuban NO 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (LD Kab Tuban Th 2021 seri D NO 1, TLD Kab Tuban NO 154);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LD Kab Tuban Th 2021 seri E NO 143, TLD Kab Tuban NO 156);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kab Tuban Th 2021 seri D NO 4);
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 dimaksudkan sebagai acuan/pedoman dalam rangka merumuskan pelaksanaan program dan kegiatan, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 adalah:

1. dalam rangka mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. menentukan prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik;
3. menjawab dan menyelesaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi tahun lalu sebagai bagian dari evaluasi agar masalah dan kendala serupa tidak muncul.
4. sebagai evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban melaksanakan 3 (tiga) program dengan 11 (Sebelas) kegiatan pokok, terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
- b. Pendampingan dan Asistensi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep efisiensi anggaran atau *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dan perkiraan capaian Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi
Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n – 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n – 2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n – 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n – 2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n – 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n – 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6 01	Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan									
6 0101	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin)	82 Poin	83.9	84 Poin	84.05 Poin	100%	84.15	84.15	100%
6 01012.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A	-	-	-	-	-	-	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang	9 Dok	7	9	9	100%	9	9	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		tersusun								
6 0101 2.0 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	2	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	100%
6 0101 2.0 1 0 6	Koordinasi,dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	3	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
6 0101 2.0 1 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	2	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
6 0101 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)	80 Poin	-	-	-	-	-	-	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n – 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n – 2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n – 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n – 2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n – 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n – 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	28 Dok	6	7	7	100%	7	7	100%
6 0101 2.0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ bulan	50	48 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	100%	48	56 Orang/ bulan	100%
6 0101 2.0 0 2	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	9	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
6 0101 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik	80 Poin	-	-	-	-	-	-	100%
		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	64 Orang	62	48 Orang	50 Orang	104%	53	56	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n – 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n – 2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n – 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n – 2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n – 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n – 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6 0101 2.0 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut	64 Paket	62	-	-	-	-	-	100%
6 0101 2.0 5 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsinya	85 Org	59	30 Orang	63 Orang	189%	80 Org	80 Org	100%
6 0101 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur atas Layanan Umum dan Kepegawaian Internal	80 Poin	-	-	-	-	-	-	100%
		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Layanan	5	5	5	100%	5	5	100%
6 0101 2.0 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jenis Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3 Paket	3	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n - 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n - 2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n - 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n - 2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n - 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n - 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kantor	Kantor yang Disediakan								
6 0101 2.0 6 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	9	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	15 Paket	100%
6 0101 2.0 6 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	5	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%
6 0101 2.0 6 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1080 Dokumen	180	240 Dok	240 Dok	100%	240 Dokumen	240 Dokumen	100%
6 0101 2.0 6 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	75	80 Laporan	73 Laporan	91.25 %	80 Laporan	80 Laporan	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	3	-	-	-	-	3	3	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n - 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n - 2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n - 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n - 2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n - 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n - 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kantor yang Disediakan								
6 0101 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik	80 Poin	-	-	-	-	-	-	100%
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	56 Unit	21	10	15	150%	26	26	100%
6 0101 2.0 7 0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100%	22	22	100%
6 0101 2.0 7 0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	48 Unit	6	6 Unit	6Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
6 0101 2.0 7 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	10	5 Unit	5 Unit	100%	158 Unit	158 Unit	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n - 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n - 2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n - 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n - 2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n - 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n - 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6 0101 2.0 0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	100%
6 0101 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik	80 Poin	-	-	-	-	-	-	100%
		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Jasa	7	7	7	100%	7	7	100%
6 0101 2.0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
6 0101 2.0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	3	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n - 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n - 2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n - 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n - 2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n - 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n - 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6 0101 2.0 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	3	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0%	12	12	100%
6 0101 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik	80 Poin	-	-	-	-	-	-	100%
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	35 Unit	24	35	35	100%	35	35	100%
6 0101 2.0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	26 Unit	17	26 Unit	26 Unit	100%	26 Unit	26 Unit	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n – 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n – 2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n – 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n – 2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n – 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n – 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
6 0101 2.0 0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	5	7 Unit	7 Unit	100%	7 unit	7 unit	100%
6 0101 2.0 0 9 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2	2 Unit	2 Unit	100%	2 unit	2 unit	100%
6 0102	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP yang di Tindak Lanjuti (%)	96%	98.95	100	100	100%	100	100	100%
6 0102 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelenggaraan	100%	72.31	100%	100%	100%	100	100	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n – 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n – 2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n – 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n – 2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n – 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n – 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Internal	Pengawasan Internal								
6 0102 2.0 0 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24 Laporan	4	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
6 0102 2.0 0 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	200 Laporan	13	40 Laporan	40 Laporan	100%	40 Laporan	40 Laporan	100%
6 0102 2.0 0 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	285 Laporan	49	57 Laporan	57 Laporan	100%	57 Laporan	57 Laporan	100%
6 0102 2.0 0 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	10 Laporan	2	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
6 0102 2.0 0 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100 Laporan	20	20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan	20 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n - 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n - 2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n - 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n - 2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n - 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n - 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6 0102 2.0 0 6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	10 Kesepakatan	2	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	100%	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	100%
6 0102 2.0 0 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dok	4	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
6 0102 2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Lap Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6 0102 2.0 0 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang	30 Laporan	2	6 Lapora	3 Lapora	50%	6 Laporan	6 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n - 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n - 2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n - 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n - 2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n - 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n - 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Ditangani			n	n				
6 0102 2.0 2 0 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	60 Laporan	32	12 Laporan	30 Laporan	250%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6 0103	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah (%)	100%	85.19%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6 0103 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Prosentase Dok Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6 0103 2.0 1 0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10 Rekomendasi	2	2 Rekom	2 Rekom	100%	2 Rekome	2 Rekome	100%

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Keg. (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. Dan Keg. s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Prog. dan Keg. Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg s/d tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = (7/6)	9.	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Bidang Pengawasan	yang Disusun			endasi	endasi		ndasi	ndasi	
6 0103 2.0 1 0 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	10 Rekomendasi	2	2 Rekom endasi	2 Rekom endasi	100%	2 Rekome ndasi	2 Rekome ndasi	100%
6 0103 2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan	100%	73.9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6 0103 2.0 2 0 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 Perangkat Daerah	42	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	100%	42 Perangkat Daerah	42 Perangka t Daerah	100%
6 0103 2.0 2 0 2	Pendampingan, Aistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	42 Perangkat	42	42 Perangkat	42 Perangkat	100%	42 Perangkat	42 Perangka	100%

[illegible]

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada realisasi tahun 2024, program yang target kinerja hasil belum tercapai dari yang direncanakan, yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan, pada sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. Adapun indikatornya yaitu Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani sebesar 50% dari target yang ditetapkan sesuai dengan hasil Renstra 2025-2029 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan sub tersebut memakai tren negatif, dimana semakin sedikit jumlah pengaduan maka akan semakin bagus.
2. Program yang target kinerja keluarannya tercapai melebihi target yaitu pada program Penyelenggaraan Pengawasan, pada sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dari target kinerja yang ditetapkan sesuai hasil reviu Renstra 2021-2026 sebanyak 100%, terealisasi sebanyak 250%. Hal ini dikarenakan adanya penugasan mandatori dan penugasan atas perintah Kepala Daerah. Sehingga banyaknya melebihi dari target yang telah ditetapkan dan persentase capaiannya melampaui angka 100%.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dalam mencapai target kinerja yang di tetapkan adalah :
 - optimalisasi terhadap sumber daya yang ada khususnya Sumber Daya Manusia, serta waktu dalam pelaksanaan kegiatan;
 - meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan yang targetnya belum terpenuhi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja dan akuntabilitas pelayanan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan

ketimpangan pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban mengampu misi ke-4 dari Kepala Daerah Terpilih yaitu *“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif”*. Misi ini merupakan tujuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang dijabarkan dalam sasaran Inspektorat Daerah yaitu *“Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026, serta untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka dapat diketahui dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan Tahun 2025.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023 (n – 2)	Tahun 2024 (n– 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n – 2)	Tahun 2024 (n –1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
Meningkat nya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi intern pemerintah .	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	-	3	-	
		Persentase SAKIP OPD minimal BB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	-	
Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	-	-	-	-	n/a	3,26	-	3,32	3,38	Belum tercapai
		Presentase Nilai SAKIP OPD dengan Kategori Minimal A	-	-	-	-	n/a	61,9%	-	66,67 %	73,8%	Belum tercapai

Capaian kinerja indikator sasaran pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Intern Pemerintah” untuk masing-masing target dan realisasinya sebagaimana tabel di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Indikator Sasaran “Level Maturitas SPIP”, target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 sesuai reviu dokumen Berita Acara Perubahan Target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, dengan nilai level 3 , sesuai BA perubahan target dan capaian realisasinya masih dalam Proses.
- b. Indikator Sasaran “Persentase SAKIP OPD dengan kategori peringkat minimal BB (Sangat Baik)”, target kinerja yang ditetapkan dalam Tahun 2025 sesuai dengan reviu Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026 sebesar 100% dan capaian realisasinya masih dalam Proses.

Capaian kinerja indikator sasaran pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” untuk masing-masing target dan realisasinya sebagaimana tabel di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Indikator Sasaran “Nilai Maturitas SPIP”, target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 sesuai reviu dokumen Berita Acara Perubahan Target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban

Tahun 2021-2026, dengan nilai 3,32 , sesuai BA perubahan target dan capaian realisasinya masih dalam Proses.

- b. Indikator Sasaran “Presentase Nilai SAKIP OPD dengan Kategori Minimal A”, target kinerja yang ditetapkan dalam Tahun 2025 sesuai dengan reviu Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026 sebesar 66,67% dan capaian realisasinya masih dalam Proses.

Kegiatan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 diikuti sebanyak 42 OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Tuban, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dituntut mampu menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi, dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD tersebut, Inspektorat Daerah mendukung pencapaian misi ke-4 dengan Tujuan “Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani.”

Kinerja Inspektorat Daerah secara kelembagaan dapat dinilai dari tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kapabilitas APIP merupakan penilaian kemampuan APIP berdasarkan kriteria *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang mengelompokkan kapabilitas APIP ke dalam lima Level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Dalam rangka pencapaian misi dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026, fungsi pengawasan harus dilakukan secara profesional, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, sehingga tercipta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, menuju tata pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk

merealisasikan misi tersebut, disadari adanya beberapa permasalahan yang dihadapi baik permasalahan dari dalam/internal berupa kekuatan/strengths dan kelemahan/weakness maupun dari luar/eksternal berupa peluang/*opportunities* dan hambatan/*threats*.

Pada saat penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini perlu mempertimbangkan Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu :

Visi : Mbangun Desa Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi Karya lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Misi : 1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan, yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif.
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, responsif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital serta menguatkan sistem pengawasan yang efektif.

Dengan Demikian Inspektorat Daerah mendukung pencapaian misi ke-4 yaitu “Memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, responsif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital serta menguatkan sistem pengawasan yang efektif” dengan tujuan “Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani.”

Dari hasil analisis atas lingkungan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, baik aspek internal dan eksternal, maka prediksi 5 (lima) tahun ke depan dapat diketahui sebagai berikut :

1. Pengaruh Lingkungan Internal

a. Kekuatan/*Strength*

- Adanya Struktur Organisasi yang jelas;

- Tersedianya anggaran yang cukup;
- Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan yang jelas.

b. Kelemahan/ *Weakness*

- Jumlah Aparat Pengawas kurang dari memadai;
- Fokus pemeriksaan masih cenderung kepada ketaatan Peraturan Perundang-undangan;
- Kompetensi aparat pengawas kurang memadai.

2. Pengaruh Lingkungan Eksternal

a. Peluang/ *Opportunities*

- Besarnya jumlah obrik yang harus diperiksa;
- Dukungan pimpinan/Bupati terhadap pelaksanaan pengawasan;
- Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari KKN;

b. Ancaman/ *Threats*

- Rendahnya kesadaran obrik menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
- Hasil pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan terhadap kinerja perangkat daerah;
- Aturan Perundang-undangan sering berubah.

Pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah sebagai salah satu fungsi manajemen organisasi pemerintahan memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik Inspektorat Daerah selaku APIP akan berdampak langsung pada kinerja reformasi birokrasi dan upaya pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, kinerja Inspektorat Daerah berdampak pada pencapaian misi Kepala Daerah terpilih.

Terkait dengan pencapaian sasaran Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2025-2029 kinerja Inspektorat Daerah berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satu sasarannya adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta agenda pembangunan dalam memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar melalui peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan.

Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal, perumusan isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban level nasional adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Pencegahan Korupsi;
- b. Pembinaan Terhadap Penegakan Integritas;
- c. Pembinaan Penerapan Reformasi Birokrasi;
- d. Pembinaan terhadap kepatuhan LHKASN.

Adapun isu strategis level daerah/regional adalah sebagai berikut :

- a. Pendampingan terhadap Implementasi SIPD dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari KKN (*Clean Government* dan *Good Governance*);
- b. Audit Forensik;
- c. Pengawasan terhadap perencanaan penganggaran berbasis Gender;
- d. Pengawasan Mandatori/ Non PKPT.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban selalu melakukan analisis kebutuhan yang meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah yang telah disusun.

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021, maka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban lebih ditujukan pada penentuan indikator, lokasi, target capaian, serta kebutuhan dana pagu indikatif, sehingga belum bisa membandingkan dan menganalisa hasil kebutuhan baik itu terkait indikator, target capaian, lokasi dan pendanaan indikatif.

Adapun hasil penentuan indikator, lokasi target capaian dan kebutuhan dana sesuai program dan kegiatan yang terdapat pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai tabel berikut:

Tabel 2.3

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban

[illegible]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	10.415.189.010	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	10.415.189.010	Sesuai
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	10.101.989.010	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	10.101.989.010	Sesuai
7.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	238.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	238.200.000	Sesuai
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	23 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	23 Laporan	75.000.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Triwulanan/ Semesteran SKPD					Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
9.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	2 Jenis	3.350.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	2 Jenis	3.350.000.000	Sesuai
10.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56 Dokumen	50.000.000	Sesuai
11.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tuban	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	3.300.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tuban	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	3.300.000.000	Sesuai
12.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	627.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	627.500.000	Sesuai
13.	Penyediaan	Kab.	Jumlah Paket	2 Paket	177.500.000	Penyediaan	Kab.	Jumlah Paket	2 Paket	177.500.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tuban	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tuban	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Sesuai
14.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	45.000.000	Sesuai
15.	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	255.000.000	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	255.000.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	149.749.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	149.749.900	Sesuai
17.	Pengadaan Mebel	Kab. Tuban	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	94.750.000	Pengadaan Mebel	Kab. Tuban	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	94.750.000	Sesuai
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	54.999.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	54.999.900	Sesuai
19.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	330.350.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	330.350.000	Sesuai
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	200.000.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Listrik yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	130.350.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	130.350.000	Sesuai
22.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	1.049.089.574	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	1.049.089.574	Sesuai
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	250.000.000	Sesuai
24.	Pemeliharaan Peralatan dan	Kab. Tuban	Jumlah Peralatan dan	50 unit	98.770.000	Pemeliharaan Peralatan dan	Kab. Tuban	Jumlah Peralatan dan	50 unit	98.770.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Mesin Lainnya		Mesin Lainnya yang Dipelihara			Mesin Lainnya		Mesin Lainnya yang Dipelihara			
25.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	700.319.574	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	700.319.574	Sesuai
26.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Tuban	Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP yang di tindaklanjuti	100%	2.862.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Tuban	Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP yang di tindaklanjuti	100%	2.862.000.000	Sesuai
27.	Penyelenggara an Pengawasan Internal	Kab. Tuban	Prosentase Penyelenggara n Pengawasan Internal	100%	2.162.000.000	Penyelenggara n Pengawasan Internal	Kab. Tuban	Prosentase Penyelenggara n Pengawasan Internal	100%	2.162.000.000	Sesuai
28.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	337.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	337.000.000	Sesuai
29.	Pengawasan Keuangan	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil	40 Laporan	600.000.000	Pengawasan Keuangan	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil	40 Laporan	600.000.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah Daerah		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Pemerintah Daerah		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
30.	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	57 Laporan	219.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	57 Laporan	219.000.000	Sesuai
31.	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	200.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	200.000.000	Sesuai
32.	Pengawasan Desa	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Laporan	560.000.000	Pengawasan Desa	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Laporan	560.000.000	Sesuai
33.	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Tuban	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	111.000.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Tuban	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	111.000.000	Sesuai
34.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	4 Dok.	135.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	4 Dok.	135.000.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
35.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tuban	Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	700.000.000	Penyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tuban	Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	700.000.000	Sesuai
36.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	6 Laporan	200.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	6 Laporan	200.000.000	Sesuai
37.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Lapora n	500.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Lapora n	500.000.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Tuban	Persentase pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah	100%	6.154.300.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Tuban	Persentase pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah	100%	6.154.300.000	Sesuai
39.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Tuban	Prosentase Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	10.115.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Tuban	Prosentase Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	10.115.000	Sesuai
40.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Tuban	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	4.920.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Tuban	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	4.920.000	Sesuai
41.	Perumusan Kebijakan Teknis di	Kab. Tuban	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi	5.195.000	Perumusan Kebijakan Teknis di	Kab. Tuban	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi	5.195.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bidang Fasilitasi Pengawasan		Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			Bidang Fasilitasi Pengawasan		Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			
42.	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Tuban	Prosentase laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan	100%	6.144.185.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Tuban	Prosentase laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan	100%	6.144.185.000	Sesuai
43.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 Perangkat Daerah	3.464.185.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 Perangkat Daerah	3.464.185.000	Sesuai
44.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tuban	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	42 Perangkat Daerah	1.253.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tuban	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	42 Perangkat Daerah	1.253.000.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
45.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tuban	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	951.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tuban	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	951.000.000	Sesuai
46.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Tuban	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42 Perangkat Daerah	476.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Tuban	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42 Perangkat Daerah	476.000.000	Sesuai

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Tuban tidak didapati program/kegiatan mengarah kepada program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat pada program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 adalah nihil.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Pemerintah Kabupaten Tuban

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah V 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Dari agenda pembangunan dan pengarusutamaan tersebut guna mempercepat pencapaian target pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 mengamanatkan adanya peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan guna memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi, pelaksanaan reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan yang berkualitas, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi dan penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pencapaian sasaran dan target pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025 – 2029 tersebut merupakan bagian dari tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban adalah turunan dari tujuan Renstra Tahun 2025 – 2029 yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.

Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 setelah dilakukan reviu adalah "Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel".

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, adalah "Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator tujuan, indikator sasaran, dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja
Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026

Tujuan		Sasaran		Formulasi	Target
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal dalam SAKIP Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP	Sesuai BA Perubahan Target 3,38 poin
			Presentase Nilai SAKIP OPD dengan kategori minimal A	Jumlah OPD yang mendapat nilai SAKIP dengan kategori minimal A / Jumlah seluruh OPD X 100%	Sesuai BA Perubahan Target 73,8%

Keselarasan Prioritas OPD dengan Prioritas Nasional, Provinsi, dan Kabupaten (mitra)

1) Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Dengan Misi Kementerian Dalam Negeri yang disesuaikan dengan 8 (delapan) Asta Cita Misi Presiden dan Wakil Presiden, adapun Misi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

- a) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- b) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- c) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

- d) Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran daerah memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Pada uraian Misi Kementerian Dalam Negeri, misi yang relevan dengan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban adalah Misi Kementerian Dalam Negeri nomor 5.

2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2020 – 2024 adalah “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

BPKP menjalankan Misi, yaitu:

- a) Melaksanakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
- b) Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

3) Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Inspektorat Provinsi Jawa Timur berperan dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2025-2030 yaitu “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Sedangkan pernyataan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang diemban adalah Misi ketujuh dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”.

Tabel 3.2 Keterkaitan antara Misi Renstra K/L dengan Misi Perangkat Daerah

MISI			
KEMENDAGRI	BPKP	INSPEKTORAT PROV. JATIM	PERANGKAT DAERAH
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.	1. Melaksanakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan 2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur beserta hasil pemutakhirannya. Inspektorat Daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan di bidang pengawasan dalam melaksanakan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban melaksanakan 3 (tiga) program, dengan 11 (sebelas) kegiatan, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp 25.043.378.484,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, beserta pendanaan indikatif dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban tahun 2026, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6	01				URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN				25.043.378.484	APBD			27.501.468.710
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kab. Tuban	85.05 Poin	16.027.078.484	APBD		85.05 Poin	17.079.168.710
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	Kab. Tuban	9	105.200.000	APBD		9 Dok.	105.200.000
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	2 Dok.	30.200.000	APBD		2 Dok.	30.200.000
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	7 Lap.	75.000.000	APBD		7 Lap.	75.000.000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun	Kab. Tuban	9 Jenis	10.415.189.010	APBD		9 Jenis	11.666.468.710
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban	56 Orang/bulan	10.101.989.010	APBD		56 Orang/ bulan	11.441.468.710
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kab. Tuban	12 Dok	238.200.000	APBD		12 Dok	150.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2026		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						ASN							
6	01	01	2.02	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban	23 Laporan	75.000.000	APBD		23 Laporan	75.000.000
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	Kab. Tuban	2 Jenis	3.350.000.000	APBD		2 Jenis	3.350.000.000
6	01	01	2.05	000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tuban	58 Dokumen	50.000.000	APBD		58 Orang	50.000.000
6	01	01	2.05	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tuban	56 Orang	3.300.000.000	APBD		56 Orang	3.300.000.000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kab. Tuban	4 Jenis	627.500.000	APBD		4 Jenis	627.500.000
6	01	01	2.06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban	2 Paket	177.500.000	APBD		2 Paket	177.500.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6	01	01	2.06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban	1 Paket	150.000.000	APBD		1 Paket	150.000.000
6	01	01	2.06	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban	2 Paket	45.000.000	APBD		2 Paket	45.000.000
6	01	01	2.06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban	35 Lap.	255.000.000	APBD		35 Lap.	255.000.000
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	2 Jenis	149.749.900	APBD		2 Jenis	150.000.000
6	01	01	2.07	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tuban	5 Unit	94.750.000	APBD		5 Unit	100.000.000
6	01	01	2.07	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban	3 Unit	54.999.900	APBD		3 Unit	50.000.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Tuban	2 Jenis	330.350.000	APBD		2 Jenis	530.000.000
6	01	01	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban	12 Laporan	200.000.000	APBD		12 Laporan	200.000.000
6	01	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Tuban	12 Laporan	130.350.000	APBD		12 Laporan	330.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Kantor yang Disediakan							
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	3 Jenis	1.049.089.574	APBD		3 Jenis	650.000.000
6 01 01 2.09 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tuban	29 Unit	250.000.000	APBD		29 Unit	250.000.000
6 01 01 2.09 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban	50 unit	98.770.000	APBD		50 unit	100.000.000
6 01 01 2.09 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Tuban	2 unit	700.319.574	APBD		2 unit	300.000.000
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP	Kab. Tuban	100%	2.862.000.000	APBD		100%	2.862.000.000
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Tuban	100%	2.162.000.000	APBD		100%	2.162.000.000
6 01 02 2.01 000 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	5 Laporan	337.000.000	APBD		5 Laporan	337.000.000
6 01 02 2.01 000 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Kab. Tuban	40 Laporan	600.000.000	APBD		40 Laporan	600.000.000
6 01 02 2.01 000 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tuban	57 Laporan	219.000.000	APBD		57 Laporan	219.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6 01 02 2.01 000 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tuban	2 Laporan	200.000.000	APBD		2 Laporan	200.000.000
6 01 02 2.01 000 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Tuban	20 Laporan	560.000.000	APBD		20 Laporan	560.000.000
6 01 02 2.01 000 6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab. Tuban	2 Kesepakatan	111.000.000	APBD		2 Kesepakatan	111.000.000
6 01 02 2.01 000 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	Kab. Tuban	4 Dokumen	135.000.000	APBD		4 Dokumen	135.000.000
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Presentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tuban	100%	700.000.000	APBD		100%	700.000.000
6 01 02 2.02 000 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Tuban	6 Laporan	200.000.000	APBD		6 Laporan	200.000.000
6 01 02 2.02 000 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tuban	12 Laporan	500.000.000	APBD		12 Laporan	500.000.000
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah	Kab. Tuban	100%	6.154.300.000	APBD		100%	7.560.300.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Failitasi Pengawasan	Kab. Tuban	100%	10.115.000	APBD		100%	10.115.000
6	01	03	2.01	000 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Tuban	2 Rekomen dasi	4.920.000	APBD		2 Rekomendasi	4.920.000
6	01	03	2.01	000 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Tuban	2 Rekomen dasi	5.195.000	APBD		2 Rekomendasi	5.195.000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Laporan Pendampingan dan Asistensi Yang di Terbitkan	Kab. Tuban	100%	6.144.185.000	APBD		100%	7.550.185.000
6	01	03	2.02	000 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	42 Perangka t Daerah	3.464.185.000	APBD		42 Perangkat Daerah	4.864.185.000
6	01	03	2.02	000 2	Pendampingan, Aistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tuban	42 Perangka t Daerah	1.253.000.000	APBD		42 Perangkat Daerah	1.235.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.					8.		
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tuban	4 Kegiatan	951.000.000	APBD		4 Kegiatan	993.000.000
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Tuban	42 Perangka t Daerah	476.000.000	APBD		42 Perangkat Daerah	458.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Tuban yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tuban yaitu “Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi”.

Dalam Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 terdapat 3 Program dengan 11 kegiatan, dengan 33 Sub Kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun hasil penentuan indikator, lokasi target capaian dan kebutuhan dana sesuai program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai tabel berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026

KODE	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Catatan
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6 01		INSPEKTORAT DAERAH				25.043.378.484		27.501.468.710	
6 01 01	Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kab. Tuban	85,05 Poin	16.027.078.484	84,15 Poin	17.079.168.710	
6 01 01 2.01	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Tersusun	Kab. Tuban	9 Dokumen	105.200.000	9 Dokumen	105.200.000	
6 01 01 2.01 0001	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	2 Dokumen	30.200.000	2 Dokumen	30.200.000	
6 01 01 2.01 0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	7 Laporan	75.000.000	7 Laporan	75.000.000	
6 01 01 2.02	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Yang Tersusun	Kab. Tuban	9 Jenis	10.415.189.010	9 Jenis	11.666.468.710	
6 01 01 2.02 0001	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban	56 Orang/bulan	10.101.989.010	56 Orang/bulan	11.441.468.710	

KODE	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Catatan
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6 01 01 2.02 0002	Terlaksananya Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban	12 Dokumen	238.200.000	12 Dokumen	150.000.000	
6 01 01 2.02 0007	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban	23 Laporan	75.000.000	23 Laporan	75.000.000	
6 01 01 2.05	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	Kab. Tuban	2 Jenis	3.350.000.000	2 Jenis	3.350.000.000	
6 01 01 2.05 0003	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tuban	58 Dokumen	50.000.000	58 Dokumen	50.000.000	
6 01 01 2.05 0009	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tuban	56 Orang	3.300.000.000	56 Orang	3.300.000.000	
6 01 01 2.06	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kab. Tuban	4 Jenis	627.500.000	4 Jenis	627.500.000	
6 01 01 2.06 0002	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban	2 Paket	177.500.000	2 Paket	177.500.000	
6 01 01 2.06 0004	Terlaksananya	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan	Kab.	1 Paket	150.000.000	3 Paket	150.000.000	

KODE	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Catatan
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	Tuban					
6 01 01 2.06 0005	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban	2 Paket	45.000.000	2 Paket	45.000.000	
6 01 01 2.06 0009	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban	35 Laporan	255.000.000	35 Laporan	255.000.000	
6 01 01 2.07	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	2 Jenis	149.749.900	26 Unit	150.000.000	
6 01 01 2.07 0005	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Tuban	5 Unit	94.750.000	4 Unit	100.000.000	
6 01 01 2.07 0006	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban	3 Unit	54.999.900	3 Unit	50.000.000	
6 01 01 2.08	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Tuban	2 Jenis	330.350.000	7 Jasa	530.000.000	
6 01 01 2.08 0002	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	
6 01 01 2.08 0004	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban	12 Laporan	130.350.000	12 Laporan	330.000.000	

KODE	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Catatan
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6 01 01 2.09	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	3 Jenis	1.049.089.574	3 Jenis	650.000.000	
6 01 01 2.09 0002	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tuban	29 Unit	250.000.000	26 Unit	250.000.000	
6 01 01 2.09 0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban	50 unit	98.770.000	50 unit	100.000.000	
6 01 01 2.09 0010	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tuban	2 unit	700.319.574	2 unit	300.000.000	
6 01 02	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP yang di Tindak Lanjuti	Kab. Tuban	100%	2.862.000.000	100%	2.862.000.000	
6 01 02 2.01	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Tuban	100%	2.162.000.000	100%	2.162.000.000	
6 01 02 2.01 0001	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	5 Laporan	337.000.000	5 Laporan	337.000.000	

KODE	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Catatan
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6 01 02 2.01 0002	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	40 Laporan	600.000.000	40 Laporan	600.000.000	
6 01 02 2.01 0003	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tuban	57 Laporan	219.000.000	57 Laporan	219.000.000	
6 01 02 2.01 0004	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tuban	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	
6 01 02 2.01 0005	Terlaksananya Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Tuban	20 Laporan	560.000.000	20 Laporan	560.000.000	
6 01 02 2.01 0006	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab. Tuban	2 Kesepakatan	111.000.000	2 Kesepakatan	111.000.000	
6 01 02 2.01 0007	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Tuban	4 Dokumen	135.000.000	4 Dokumen	135.000.000	
6 01 02 2.02	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tuban	100%	700.000.000	100%	700.000.000	
6 01 02 2.02 0001	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Tuban	6 Laporan	200.000.000	6 Laporan	200.000.000	
6 01 02 2.02 0002	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tuban	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	
6 01 03	Meningkatnya perumusan kebijakan,	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Persentase Pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang	Kab. Tuban	100 %	6.154.300.000	100 %	7.560.300.000	

KODE	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Catatan
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		pengendalian, dan asistensi pengawasan	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	menjadi kebijakan daerah					
6	01 03 2.01	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Tuban	100 %	10.115.000	100 %	10.115.000	
6	01 03 2.01 0001	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Tuban	2 Rekomenda si	4.920.000	2 Rekomendasi	4.920.000	
6	01 03 2.01 0002	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Tuban	2 Rekomenda si	5.195.000	2 Rekomendasi	5.195.000	
6	01 03 2.02	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Tuban	100 %	6.144.185.000	100 %	7.550.185.000	
6	01 03 2.02 0001	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	42 Perangkat Daerah	3.464.185.000	42 Perangkat Daerah	4.864.185.000	
6	01 03 2.02 0002	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tuban	42 Perangkat Daerah	1.253.000.000	42 Perangkat Daerah	1.235.000.000	
6	01 03 2.02 0003	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Kab. Tuban	4 Kegiatan	951.000.000	4 Kegiatan	993.000.000	

KODE	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Catatan
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Korupsi							
6 01 03 2.02 0004	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Tuban	42 Perangkat Daerah	476.000.000	42 Perangkat Daerah	458.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2026. Karena rancangan awal Rencana Kerja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Rancangan awal Rencana Kerja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tuban, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami agar dokumen Rancangan Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait **dalam** mendukung penyelenggaraan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Tuban. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusun Rencana Kerja ke depan.

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN,

ttd.

AGUK WALUYO RAHARJO



BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY